

## Abstraksi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara detail tentang tata kelola pariwisata berbasis masyarakat dan manajemen konflik sumberdaya dalam pengembangan desa wisata Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Konflik yang terjadi di desa Krinjing harus segera bisa diatasi supaya potensi wisata desa Krinjing bisa terangkat kembali dan mampu meningkatkan potensi ekonomi bagi seluruh masyarakat desa Krinjing.

Konflik yang terjadi di desa Krinjing harus segera bisa diatasi supaya potensi wisata desa Krinjing bisa terangkat kembali dan mampu meningkatkan potensi ekonomi bagi seluruh masyarakat desa Krinjing. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan melihat bahwa Desa Wisata Krinjing yang sudah memiliki segala potensi dan pengelola wisata yang lengkap dan bisa dikatakan sebagai *community based tourism* namun masih ada konflik di dalamnya sehingga akan dicarikan rekomendasi resolusi konflik agar desa wisata Krinjing bisa kembali menjadi destinasi wisata yang dapat menarik pengunjung lebih banyak lagi, serta dapat mewujudkan misi kepala desa Krinjing yaitu menciptakan desa wisata Krinjing yang unik dan lestari.

Novelty penelitian ini dibanding dengan penelitian yang lain dilihat dari mekanisme tata kelola objek wisata yang mana wilayah objek wisata Bukit Sembrani yang terbagi menjadi dua wilayah yaitu Perum Perhutani dan tanah milik desa sehingga mengakibatkan konflik antar pengelola Pokdarwis, Bumdes, LMDH dan *stakeholder* Pemerintah Desa Krinjing.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *participatory rural appraisal*. Lokasi penelitian terletak di Desa Wisata Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu dengan kondensasi data, penyajian data, dan validasi.

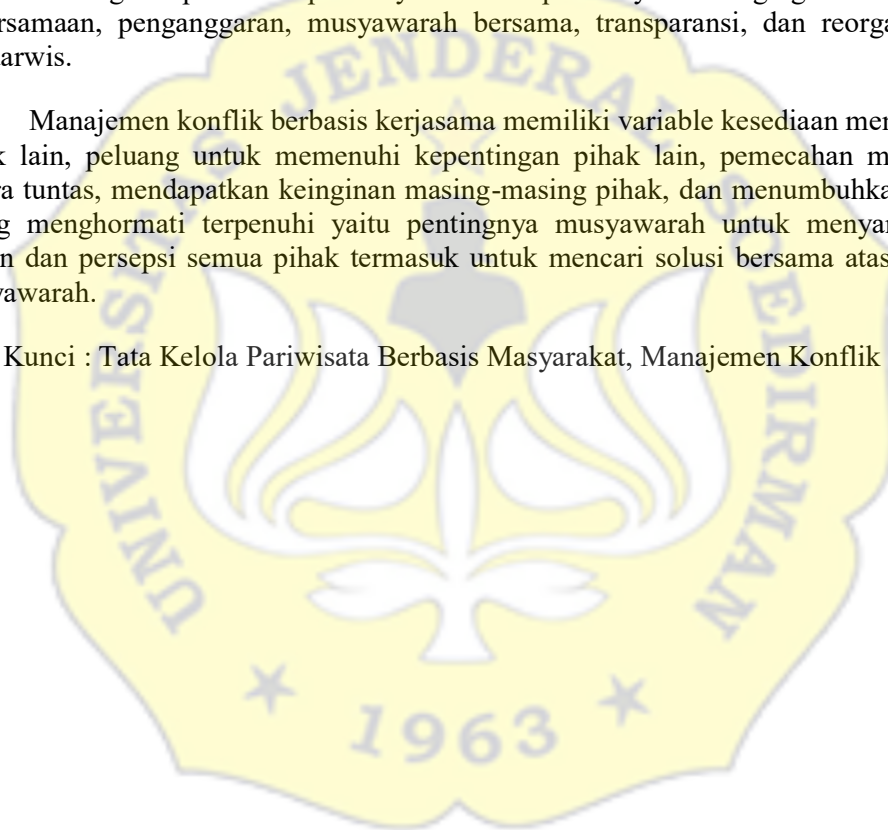
Hasil temuan di lapangan dalam tata kelola pariwisata berbasis masyarakat yaitu kebijakan pengelolaan objek wisata Bukit Sembrani oleh LMDH Krinjing dan Pokdarwis yang memiliki dua wilayah berbeda yaitu Perhutani dan tanah milik desa. LMDH mengelola wilayah Perum Perhutani atas dasar PHBM, sedangkan Pokdarwis merupakan wakil dari Pemerintah Desa dalam mengelola wisata. Masalah-masalah yang lain yaitu belum ada upaya konkrit dari pemerintah desa Krinjing dalam membangun kembali wisata Bukit Sembrani. Belum ada musyawarah desa yang dilakukan untuk membahas keberlanjutan pembangunan desa wisata pasca pandemi. Tidak adanya komunikasi antara pengelola dan *stakeholder*. Kerancuan dalam mekanisme bagi hasil antar pengelola. Adanya satu oknum yang dianggap hanya akan

memperkaya diri sendiri ketika objek wisata Bukit Sembrani dikembangkan yaitu dari ketua LMDH, hal ini yang diduga menjadi penghambat mengapa pemerintah desa masih enggan untuk melakukan perencanaan pengembangan desa wisata Krinjing.

Data temuan dilapangan terkonfirmasi sesuai dengan teori manajemen konflik berbasis kompromi dan kerjasama. Manajemen konflik berbasis kompromi dengan variable mencari jalan tengah, mengurangi tuntutan, mengerti kondisi pihak lain, tidak ada menang kalah, saling memberikan konsesi, dan mendapatkan keinginan tetapi tidak penuh kehilangan tapi tidak sepenuhnya sudah terpenuhi yaitu menginginkan adanya kebersamaan, penganggaran, musyawarah bersama, transparansi, dan reorganisasi Pokdarwis.

Manajemen konflik berbasis kerjasama memiliki variable kesediaan menerima pihak lain, peluang untuk memenuhi kepentingan pihak lain, pemecahan masalah secara tuntas, mendapatkan keinginan masing-masing pihak, dan menumbuhkan rasa saling menghormati terpenuhi yaitu pentingnya musyawarah untuk menyamakan tujuan dan persepsi semua pihak termasuk untuk mencari solusi bersama atas dasar musyawarah.

Kata Kunci : Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat, Manajemen Konflik



## *Abstraction*

*The aim of this research is to analyze in detail community-based tourism governance and resource conflict management in the development of the Krinjing tourist village, Watumalang District, Wonosobo Regency.*

*The conflict that occurred in Krinjing village must be resolved immediately so that the tourism potential of Krinjing village can be raised again and able to increase the economic potential for the entire community of Krinjing village. Therefore, in this research, we will see that the Krinjing Tourism Village already has all the potential and is a complete tourism manager and can be said to be community based tourism, but there are still conflicts within it, so recommendations for conflict resolution will be sought so that the Krinjing tourist village can become a tourist destination again. Which can attract even more visitors, and can realize the mission of the Krinjing village head, namely creating a unique and sustainable Krinjing tourist village.*

*The novelty of this research compared to other research is seen from the tourist attraction management mechanism where the Sembrani Hill tourist attraction area is divided into two areas, namely Perum Perhutani and village-owned land, resulting in conflict between Pokdarwis, Bumdes, LMDH managers and Krinjing Village Government stakeholders.*

*The research method used is a qualitative method with a participatory rural appraisal approach. The research location is located in the Krinjing Tourism Village, Watumalang District, Wonosobo Regency. The informant selection technique uses purposive sampling. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The data analysis method is data condensation, data presentation, and validation.*

*The results of findings in the field in community-based tourism management are the policy for managing the Sembrani Hill tourist attraction by LMDH Krinjing and Pokdarwis which has two different areas, namely Perhutani and village-owned land. LMDH manages the Perum Perhutani area on the basis of PHBM, while Pokdarwis is the representative of the Village Government in managing tourism. Another problem is that there has been no concrete effort from the Krinjing village government to rebuild the Bukit Sembrani tourist attraction. No village meetings have been held to discuss the sustainability of post-pandemic tourism village development. There is no communication between managers and stakeholders. Confusion in the profit sharing mechanism between managers. There is one person who is thought to only enrich themselves when the Bukit Sembrani tourist attraction is developed, namely the chairman of the LMDH, this is thought to be an obstacle to why the village government is still reluctant to plan the development of the Krinjing tourist village.*

*The data found in the field were confirmed to be in accordance with the theory of conflict management based on compromise and cooperation. Compromise-based*

*conflict management with the variables of finding a middle way, reducing demands, understanding the condition of the other party, no winning or losing, giving mutual concessions, and getting what you want but not completely losing but not completely fulfilling it, namely wanting togetherness, budgeting, joint deliberation, transparency, and reorganization of Pokdarwis*

*Cooperation-based conflict management has variables of willingness to accept the other party, opportunities to fulfill the interests of the other party, solving problems completely, getting the wishes of each party, and fostering a sense of mutual respect, namely the importance of deliberation to equalize the goals and perceptions of all parties, including finding solutions together on the basis of deliberation.*

*Keywords: Community-Based Tourism Governance, Conflict Management*

